

## KERJASAMA BILATERAL SOSIAL POLITIK CHINA DAN INDONESIA

Malika Viranti Chairunnisa<sup>1</sup>, Mohan Rosihan<sup>2</sup>, Muhamad Daffa Athallah<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Februari 2025

Revised Februari 2025

Accepted Februari 2025

Available online Februari 2025

[malikachairunnisa141@gmail.com](mailto:malikachairunnisa141@gmail.com)<sup>1</sup>,

[rosihanmohan@gmail.com](mailto:rosihanmohan@gmail.com)<sup>2</sup>,

[daffahd12@gmail.com](mailto:daffahd12@gmail.com)<sup>3</sup>



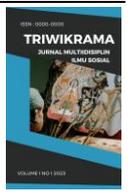
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

**Abstract.** *As a large country, Indonesia has a vast territory followed by a lot of advantages in it, starting from its maritime affairs to people's lives. Indonesia's superiority is what attracts other countries to get to know and enter the region by establishing a good relationship, one of which is China. The two countries agreed to enhance good relations in the economic, social, and political fields. The cooperation between China and Indonesia has existed for a very long time. Indonesia with its advantages and China with its advantages have made these two countries committed to each other in helping and advancing to increase the development of various sectors. This cooperation shows that the two countries need each other in the interests of their respective national interests. Here, we will discuss bilateral relations between the two countries, namely Indonesia and China during the leadership of President Joko Widodo. During Joko Widodo's leadership, he has carried out several collaborations with China. The problem in this study is to analyze the results of the process and the development of cooperation between Indonesia and China to become the*

*focus of analysis to seek bilateral cooperation that occurred in the socio-political era of Joko Widodo's leadership. The method used in this study is descriptive qualitative, namely describing the data and providing analysis with a deductive, descriptive method. The results of this study show that during Joko Widodo's leadership, political, economic, social, and cultural bilateral cooperation relations between Indonesia and China have developed very rapidly in recent years. This makes the relationship between the two countries strong. This bilateral cooperation has made the Indonesian state strong enough and Indonesia itself is favored by China. Therefore, China is intensively conducting bilateral cooperation in its social politics.*

**Keywords:** *China-Indonesia, Joko Widodo, Bilateral Cooperation*

**Abstrak.** Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki wilayah yang luas diikuti dengan banyak sekali keunggulan di dalamnya mulai dari kelautannya sampai pada kehidupan masyarakat. Keunggulan Indonesia ini yang menjadi daya tarik negara lain untuk mengenal dan masuk ke dalam wilayah dengan menjalin suatu hubungan yang baik salah satunya China. Kedua negara ini sepakat untuk meningkatkan hubungan baik dalam bidang ekonomi, sosial hingga politik. Terjalannya kerjasama antara China dan Indonesia telah terjalin sangat lama. Indonesia dengan keunggulannya dan China dengan keunggulannya yang menjadikan kedua negara ini saling berkomitmen dalam membantu dan memajukan guna peningkatan pembangunan dari berbagai sektor. Kerjasama ini menunjukkan kedua negara saling membutuhkan dalam keperluan kepentingan nasional masing-masing. Disini akan membahas mengenai hubungan bilateral antara kedua negara yaitu Indonesia dan China pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo. Selama kepemimpinan Joko Widodo, telah melakukan



beberapa kerja sama dengan China. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis hasil proses dan perkembangan kerjasama Indonesia dan China menjadi fokus analisis untuk mencari kerjasama bilateral yang terjadi dalam sosial politik era kepemimpinan Joko Widodo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjabarkan data dan memberikan analisis dengan deskriptif secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo hubungan kerjasama bilateral politik, ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan China telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, membuat hubungan kedua negara ini menjadi kuat. Kerjasama bilateral ini menjadikan negara Indonesia cukup kuat dan Indonesia sendiri disukai oleh China. Maka dari itu, China gencar melakukan kerjasama bilateral di dalam sosial politiknya.

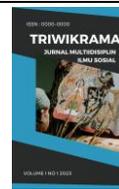
**Kata Kunci:** China-Indonesia, Joko Widodo, Kerjasama Bilateral

## PENDAHULUAN

Menurut para ahli kerja sama adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.? Menurut Jafar Hafisah, kerja sama dengan istilah "kemitraan", yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kerjasama bisa juga muncul dari komitmen pribadi untuk kesejahteraan umum atau usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Bagian penting dari perilaku kooperatif adalah aktif, sejauh mana semua orang percaya bahwa pihak lain itu mitra yang menguntungkan. Teori kerjasama adalah realisasi kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan kerjasama, seperti untuk mencoba memenuhi kepentingan mereka sendiri bereksperimen sendiri atau bersama untuk bersaing.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain dimulai setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa lembaga, baik bilateral, Indonesia merencanakan kerjasama baik regional maupun multilateral untuk menggunakan negara negara tersebut sebagai sahabat untuk membangun hubungan baik. Dalam menentukan korelasi ini Indonesia selalu mengedepankan pemajuan kehidupan masyarakat, nilai-nilai saling menghormati, mencampuri urusan negara lain, menyerahkan Pelaksanaan kekuasaan dan konsultasi dan prioritas persetujuan dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia saat ini bekerja secara bilateral dengan 162 negara daerah tertentu yang bukan merupakan daerah berpemerintahan sendiri. Ada alasan mengapa banyak negara telah bekerja sama dengan Indonesia.

Setiap negara harus bekerja sama secara bilateral untuk menjaga perdamaian dunia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi orang lain, bekerja sama dengan imigrasi, mengatasi masalah global bersama dan mencapai kemajuan budaya. Kerjasama Bilateral dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang turut menyebabkan terjadinya hubungan tersebut Kerja sama bilateral: 1) Ketidakkampuan negara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan



sumber daya alam negaranya, 2) Ketidakmampuan negara untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat karena keterbatasan teknis dan juga karena kurangnya sumber daya manusia Kualitas. 3) Ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan konflik internalnya 4) Keinginan negara untuk berdamai dengan negara peserta hubungan bilateral. 5) Keinginan negara untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan Rakyat 6) Keinginan negara untuk mempercepat pembangunan negara. Salah satu negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia yakni negara China. Diketahui sebagai "Negeri Tirai Bambu", China merupakan negara dengan posisi dengan keadaan ekonomi yang baik dan teknologi berkembang dengan lebih cepat dari negara lainnya, oleh karena itu China dianggap sebagai kekuatan besar di Asia dan reputasinya sebagai kekuatan besar telah menyebar ke Amerika Serikat hingga Eropa.

Hubungan yang terjalin antara Indonesia-China merupakan sejarah panjang, yakni adanya interaksi antara nenek moyang bangsa Indonesia dengan Tionghoa yang terjalin sejak abad sebelum masehi. berasal dari keterkaitan hubungan kedua negara telah terlihat sejak datangnya etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peninggalan sejarah kerajaankerajaan Indonesia kuno yang memiliki keterkaitan dengan China, seperti kerajaan Sriwijaya, Airlangga, dan Majapahit. Munculnya kebaikan dari Cheng Ho kepada Indonesia pada abad14 dipicu dengan hubungan simbolis dari keterlibatan antar negara. Perjalanan sejarah yang panjang yang dilalui oleh Indonesia dan China dalam membentuk hubungan politik yang mulai diresmikan pada 9 Juni 1950. Namun seiring berjalanan waktu sampai pada akhirnya kedua hubungan dua negara ini bersitegang dalam hubungan diplomatiknya ditahun 1967 dan mencairnya perselisihan ini pada 3 Juli 1990 yang ditandai dengan oleh dua Menteri luar negeri di Beijing untuk menyepakati "The Resumption of the Diplomatic Relations between the Two Countries" (Sudjatmiko, 2012). Menguarnya hubungan Indonesia-China pada kepemimpinan Joko Widodo mulai menguat. Adanya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur yang nantinya dijadikan sebagai investasi besar ini membuat Indonesia melakukan Kerjasama kepada China.

Terpilihnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin RI ke-7 kemungkinan besar Akan membarui ciri dan gaya diplomasi Indonesia yg tidak sama dengan praktik diplomasi 10 tahun terakhir dalam era Presiden SBY (Madu, 2014). Sejak menjadi presiden pada masa jabatan pertamanya dari tahun 2014 hingga 2018, Jokowi telah menetapkan kebijakan-kebijakan untuk merespon dan menyikapi isu-isu kewargaan publik yang menarik dari kepemimpinan sebelumnya (Hastangka, 2020). Perencanaan atau program kerja lima tahun ke depan 2014-2019 harus segera ditambah dengan seruan Presiden Joko Widodo. Salah satunya mengenai kebijaksanaan maritim "sokoguru" politik luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi maritim, politik luar negeri harus didedikasikan dan berorientasi pada perwujudan kepentingan bersama, yaitu penciptaan dan perwujudan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan terpisah secara budaya. Kebijaksanaan terus dipraktikkan dengan didasarkan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif (Madu, 2014). Perayaan 65 tahun menjadi simbol hubungan bilateral Indonesia dan China yang mula membaik. Untuk merayakannya, Presiden Joko Widodo berkunjung ke China Kembali pada 25-28 Maret 2015. Kunjungan ini juga diikuti dengan pembahasan kerjasama Indonesia-China dalam memperkuat hubungan keduanya.

Berdasarkan hal di atas terjalannya kerjasama negara Indonesia dengan beberapa negara lainnya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi oleh negara itu sendiri sehingga diperlukan kerjasama bilateral yang salah satunya dilakukan oleh Indonesia dengan China dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi masing-masing negara, kerjasama bilateral Indonesia-China sudah terjalin sejak zaman nenek moyang dan masih terjalin hingga saat ini yakni pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo, lalu bagaimanakah proses dan perkembangan kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan China baik dalam bidang sosial dan politik pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo tahun 2014-2020.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu penyajian informasi dan analisis deskriptif deduktif. Yang mana, menganalisis hasil kerjasama Indonesia dan China menjadi fokus analisis untuk mencari kerjasama bilateral yang terjadi dalam sosial politik era kepemimpinan Joko Widodo. Studi pustaka digunakan buat merogoh data dan pemahaman lebih berdasarkan penelitian terdahulu. Analisis ini didukung dengan data yang diambil dari buku, jurnal, dan website resmi pemerintah (Simanjutak, 2020). Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang mengarah pada proses yang ditujukan untuk membuat kabar kualitatif melalui penggambaran yang cermat. Penelitian kualitatif bukan menjelaskan pengukuran atau metode kuantitatif lainnya. olehnya, penelitian kualitatif hanya menggambarkan masalah yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berguna untuk menjelaskan gambaran keadaan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan relevan dengan lebih dari satu variabel penelitian atau permasalahan penelitian.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana dinamika kerjasama bilateral sosial politik antara China dan Indonesia selama masa kepemimpinan Joko Widodo?
2. Apa kerja sama yang masih berkembang pesat hingga saat ini?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis perkembangan kerjasama bilateral antara China dan Indonesia.
2. Membandingkan model kerja sama bilateral China – Indonesia dengan negara-negara lain di Kawasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Kerjasama**

Bilateral Disampaikan oleh KJ Hosti, hubungan bilateral ini terbentuk karena adanya konflik dalam interaksi. Maka dari itu, konflik ini yang menyebabkan berlangsungnya hubungan serius yang bukan sekedar persaingan saja.

Konflik ini sering disebabkan oleh konflik dalam mencapai keinginan tertentu seperti ekspansi wilayah, keamanan, kemudahan akses ke wilayah perdagangan, prestise, aliansi,

revolusi dunia, penggulingan pemerintah negara yang bermusuhan, perubahan prosedur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain-lain. Usaha guna menjaga atau mencapai tujuan, perintah, aktivitas, atau keduanya, yang akan bertentangan dengan kepentingan dan tujuan negara lain.

Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama antara 2 sisi, sehingga terdapat dua entitas yang bertindak sebagai Negara. Hal ini, dilihat dari adanya rasa kebergantungan satu negara dengan negara yang lainnya. Tanpa adanya suatu hubungan dari kedua negara akan membuat salah satu negara ini tidak dapat bertahan. Dikatakan oleh Kusumo Hamidjo, Kerjasama bilateral yaitu hubungan Kerjasama antar negara yang tidak dibatasi dari geografisnya, untuk mencapai tujuan dalam menciptakan perdamaian dunia dalam hal politik, ekonomi, sosial, hingga pada budayanya.

Menurut Juwondo, kerjasama bilateral yang dipimpin oleh satu negara benar-benar fundamental sebab kerjasama bilateral adalah interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan ditingkatkan dengan menghormati hak kedua nya untuk bekerja sama dalam segala bidang kehidupan sebagai negarabangsa juga tidak mengabaikan dan mengisolasi keberadaan negara lain dan mewujudkan perdamaian dan nilai tambah yang mendukung hubungan bilateral. Kerjasama bilateral dapat mencakup banyak bidang, antara lain politik, ekonomi, budaya - masyarakat, pertahanan dan keamanan (Amalia, 2018). Kerjasama bilateral ini dilakukan di beberapa bidang seperti budaya, politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Penyelesaian permasalahan yang terjadi pada kedua negara ini bisa dilakukan dengan melalui kerjasama bilateral. Adanya kepentingan dari tiaptiap negara dapat dilakukan dengan beberapa jenis Kerjasama bilateral yang disesuaikan dengan keperluan tersebut. Dari Kerjasama bilateral ini sangat tidak dipungkiri memiliki posisi yang penting untuk meminta bantuan dari negara lain karena sejatinya negara tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dorongan ini akhirnya membuat negara-negara terlibat dalam kerjasama internasional termasuk Kerjasama bilateral ini. Adanya kesamaan kepentingan dua negara menegaskan Kerjasama bilateral ini memiliki peran penting untuk menghindari konflik-konflik.

### **Hubungan China Dan Indonesia Dalam Kerjasama Bilateral**

Berhubungan diplomasi antara Indonesia China telah dimulai dari tahun 1950. Hubungan yang aktif sebab keadaan internal China Indonesia prihatin dengan prosesnya rekonstruksi dalam suasana revolusi. Hubungan diplomatik Indonesia dan China dibekukan pada oktober 1967. Setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI China menjadi negara yang berperan dalam mendukung PKI saat itu. China sudah memulai upaya menjalin kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1985-1988. Adanya peran serta dukungan China terhadap PKI berakibat pada timbulnya keraguan politik Indonesia terhadap China dalam menormalkan hubungan tersebut. Pulihnya hubungan IndonesiaChina ditandai dengan adanya kondisi terika, bersama, serta kunjungan perdana menteri China ke Indonesia pada tanggal 6-10 agustus 1990 dengan menandatangani kesepakatan tentang pemulihan hubungan diplomatik serta tanda tangan perjanjian kerjasama ekonomi dan bisnis.

Kedatangan China memberikan kekuatan penting untuk pembangunan strategis di wilayah Asia Timur dan sekitarnya, hal ini merupakan kekuatan pendorong adanya perubahan



dalam dinamika hubungan kekuasaan serta pengaruh penting dalam politik asia timur. China merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek termasuk dalam keuangan, keamanan, militer, dan politik. Adanya kebijaksanaan pintu terbuka mampu membawa perekonomian pasar China ke arah yang lebih modern, kebijaksanaan ini mampu membawa China melalui perubahan besar yang terjadi dalam struktur perekonomian nasional.

Ketika masa kepemimpinan presiden Joko Widodo jaringan Indonesia-China berkembang cukup pesat. Sebenarnya pertumbuhan tersebut bagian dari indikasi kuat kebijakan luar negeri Indonesia pada China. Prioritas presiden Jokowi terhadap China telah terlihat dari awal mandatnya. Secara simbol negara China merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh presiden Jokowi yakni pada 8 November 2014. Kunjungan yang dilakukan Jokowi bertepatan dengan dilaksanakannya KTT APEC di Beijing China. Membaiknya jaringan Indonesia-tingkok tercermin dalam peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-China. Kemudian presiden Jokowi melakukan kunjungan kembali pada tanggal 25-28 maret 2015 guna membahas beberapa isu dalam rangka memperkuat kerjasama ChinaIndonesia. Dalam pembahasan tersebut para kepala negara memfokuskan pada bidang ekonomi khususnya perniagaan, infrastruktur, industri, keuangan, pariwisata, dan sosial, dari pertemuan ini di sepekat 8 nota kesepahaman.

Kesepakatan antara Indonesia dan China atas 36 nota kesepahaman dengan waktu yang sangat relatif singkat dengan menunjukkan keseriusan China dan Indonesia dalam mempererat hubungan. Hubungan Indonesia-China dipengaruhi oleh faktor internal yakni adanya kebutuhan pembangunan sarana prasarana dibawah kepemimpinan Jokowi. Indonesia mempunyai rancangan pembanguna yang ambisius dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.700 Triliun (Bappenas, 2015). Pada kenyataanya pemerintah Indonesia tidak mampu dalam membiayai pembanguan infrastruktur tersebut, sehingga perlunya investasi asing. Adapun faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap sikap Indonesia kepada China yakni adanya kegagalan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan strategi Asianya. Amerika Serikat menjadi sangat terancam dengan keberadaan China yang telah mempunyai kekuatan serta adanya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh China. Amerika Serikat memperkenalkan konsep "Rebalancing to Asia". Untuk menaikkan tingkat keamanan Kawasan serta kemakmuran ekonomi di Kawasan Indo-Asia-Pasifik ini merupakan tujuan dari terbentuknya konsep dari Rebalance to Asia oleh Amerika Serikat. Selanjutnya terbentuk aliansi Trans-Pacific Partnership (TPP) yang merupakan wujud untuk melakukan perubahan yang memulihkan dengan menciptakan kerjasama ekonomi bagi negara-negara terutama dalam Kawasan Asia-Pasifik. Maksud lain dari TPP berguna untuk mempererat ekonomi antar negara agar mendorong pertumbuhan dalam perdagangan.

Dalam awal masa jabatan Presiden Jokowi pada 2015, lalu nilai perdagangan China dengan Indonesia menyusut menjadi USD 43,2 miliar dari hanya USD 8,7 pada tahun 2005 Satu miliar. Indonesia ingin meningkatkan investasi China di negara tersebut. Tirai Bambu kini menjadi negara ketiga terbesar investor asing setelah Singapura Jepang. Indonesia kini memiliki hubungan yang lebih dekat dengan China kecuali perjanjian untuk memperkuat kerja sama bilateral strategi komprehensif di tahun 2013. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) sepakat kerja sama di delapan bidang.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) diselenggarakan di ruang publik besar pejabat Indonesia dan saksi China adalah Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping.

Mengidentifikasi peluang kerjasama berdasarkan saling menguntungkan dan timbal balik menguntungkan Pertemuan tingkat tinggi kehumasan di Indonesia dan Cina dianggap sebagai Cina dan Indonesia secara bergantian. Bertemu di level tinggi dalam bidang hubungan antar masyarakat antara Indonesia dan Cina yang pertama kali terjadi di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2015 di Kantor Kementerian Kerjasama Pembangunan Orang dan Budaya.

Tahun 2017, Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk pertemuan ketiga membahas perihal hubungan manusia yang dilakukan antara Indonesia dan China. Pertemuan ini memberikan kesempatan baik untuk memberikan harapan dalam kerjasamanya. Adanya pertemuan, kedua negara saling memberikan masukan dan memperkenalkan mengenai pengetahuan dan pemahaman. Ini dibentuk dengan adanya forum pertukaran informasi, mengenalkan tujuan dan strategi dalam bidang hubungan antar komunitas, mengangkat isu terkait pergerakan antar kedua negara tersebut, dan memberikan Kerjasama yang baik dalam kepemimpinan kedua negara. Sedangkan, dalam hubungan ekonomi kedua negara ini melakukan Kerjasama dengan menjadi mitra dan sumber bisnis, guna mendorong investasi China dalam proyek Percepatan dan Rencana Induk Perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), untuk menjadi negara maju begitupun sebaliknya.

### **Bentuk Kerjasama Bilateral China Dan Indonesia**

Kerjasama antara Indonesia dan China lebih merupakan kerja sama antara perusahaan-perusahaan milik negara. Jika dilihat lebih jauh, dalam hal ini China memang telah merebut hati Indonesia dan perlahan mencoba menembus lebih dalam ke lapisan vital Indonesia, dimana lapisan ini merupakan sektor terpenting yang perlu banyak pembenahan dan bantuan eksternal untuk kekuasaan.

Beberapa tahun terakhir hubungan bilateral politik, ekonomi, sosial dan budaya antara Indonesia dan China telah terjalin dengan erat. Hal ini ditandai dengan peningkatan pertemuan antara kepala negara dan pemerintahan negara negara tersebut. Menjabatnya Presiden Jokowi sebagai pada Oktober 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia, ia melakukan pertemuan sebanyak empat kali dengan Presiden Xi Jiping bersama pejabat senior lainnya. Sekitar kurang lebih 60 perjanjian Kerjasama Indonesia dan China selama empat tahun terakhir dan kurang lebih 20 perjanjian kerjasama untuk membahas hubungan masyarakat. Kegiatan pemberian beasiswa kepada para pelajar, Indonesia dan China telah melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan. Kerjasama ini juga membahas mengenai standarisasi dalam penyelenggaraan ujian Bahasa mandarin (HSK) yang berada di Indonesia. Dari kerjasama yang telah dilakukan telah mengalami peningkatan yang pesat dalam Pendidikan pada tahun 2016. Gagasan ini terbentuk oleh Beijing Foreign Studies University dengan adanya Aliansi ThinkTank China Indonesia, beranggotakan dari China yang terdiri dari beberapa universitas bersama dengan Indonesia dengan anggota dari beberapa universitas. Hal ini dilakukan agar menjadi sarana dalam kerjasama dan pertukaran informasi untuk perguruan tinggi di Indonesia dan China.

Semakin banyak orang China yang datang ke Indonesia, oleh karena itu bahasa asing yaitu bahasa Mandarin dibutuhkan oleh orang Indonesia selain bahasa Inggris. Keterampilan bahasa Mandarin asli ini digunakan sebagai sarana komunikasi langsung dengan orang Cina yang berbicara sedikit bahasa Inggris. Apalagi di kawasan komersial yang banyak orang China termasuk atasannya.

Masyarakat lokal yang mempelajari bahasan mandari terbantu dengan Lembaga CI. Lembaga CI yang merupakan Lembaga pembelajaran Bahasa Mandarin yang langsung dibantu dengan pengajar langsung dari China. Kegiatan belajar Bahasa mandari ini mempunyai pengaruh dalam masyarakat karena di Indonesia cukup banyak orang dengan keturunan Tionghoa. Akan tetapi, bukan hanya China yang membantu dalam pembelajaran Bahan Mandari namun pihak Indonesia juga membantu untuk negara China. Dengan artian bahwa kedua negara ini saling melengkapi dengan adanya kerjasama ini. Pengajar Bahasa Mandari melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran baik dari kurikulum, metode hingga pada pembentukan guru-guru.

Fokus presiden Joko Widodo telah terlihat dengan China pada awal kepemimpinannya. Ini merupakan isyarat kuat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dengan China. Semakin lama terjalin hubungan yang kuat dan berkembang bagi kedua negara ini.

Sangat sulit bagi Indonesia untuk menghindari fakta bahwa Laut China Selatan memiliki kepentingan besar dan strategis. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus melakukan perubahan dengan perluasan pertahanan, ekonomi dan budaya. Terutama dalam hal memadamkan konflik wilayah Laut China Selatan yang telah berdampak pada situasi di area kawasan tersebut. Presiden Joko Widodo memegang teguh untuk menjadikan Indonesia sebagai “penengah yang jujur” dalam upaya melakukan perdamaian baik itu dalam keamanan hingga konflik. Indonesia juga memilih untuk tidak ikut campur dalam hal yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Maka dengan itu, Presiden Joko Widodo meminta untuk militer Indonesia Kembali ditingkatkan menjadi lebih baik.

Dilihat dari kepemimpinan presiden Joko Widodo terlihat dari keseriusan untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia di wilayah natuna yang telah memberikan amanat ini. Terdapat tindakan-tindakan cepat untuk mengamknkan kawasan perbatasan tersebut dari pihak China. Perlakuan yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo dapat dikatakan tidaklah main-main.

Organisasi ASEAN dan China merupakan pendekatan regional yang dilakukan oleh Indonesia dengan China. Terkait dengan mengenai konflik Laut China Selatan Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan kebijakan hukum dan diplomasi, dan lintas sektor. Melalui kedua cara tersebut, inti yang dimaksud bertujuan agar Indonesia ikut dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan. Dengan diplomasi yang menjadi tujuan dalam memelihara kestabilan dari keamanan regional diikuti oleh China dan Negara di ASEAN untuk tidak bertindak yang akan menimbulkan ketegangan militer. Indonesia menerapkan kebijakan hukum dan diplomasi dalam pemecahan masalah Laut China Selatan dengan konteks berdasarkan Prinsip-Prinsip PBB.

Dilakukam implementasi oleh Presiden China Xi Jinping. Tujuan adanya program ini guna untuk negara maju dan negara berkembang mendapatkan konektivitas global. Adanya

perdagangan bebas yang lebih efektif dan baik dalam pasar internasional maka BRI telah difokuskan untuk kegiatan tersebut. Terdapat dua jalur yang dimiliki oleh BRI yaitu Jalur sutera darat (Silk Road Economic Belt) dan Jalur sutera maritim (Maritime Silk Road). Telah lebih dari 65 negara yang dihubungkan oleh BRI bahkan lebih dari 62% populasi, dengan 35% perdagangan dunia dan 31% PDB dunia.

Terbukanya jalur sutra BRI menjadikan hubungan kedua belah negara Indonesia dan China semakin erat. Terbukti pada hubungan bilateral terjadi peningkatan dalam Kerjasama. Pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat sehingga tidak ada perbedaan ekonomi baik itu kota maupun desa. Presiden Joko Widodo juga melakukan pemerataan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah atau kurang mendapat perhatian. Selain itu, dalam politik Indonesia dan China tetap menjaga hubungan Kerjasama ini. China patut mempertimbangkan Indonesia sebagai pemasok bahan untuk dijadikan sumber daya yang besar yang juga dilihat dari geopolitik dan geostrategisnya. Namun, disisi lain Indonesia menjaga dirinya dari China untuk tidak terlibat dalam tekanan politik baik internal maupun eksternal.

Indonesia dijadikan "Poros Maritim Dunia" telah menjadi daftar dari Presiden Joko Widodo di tahun 2015. Serta melakukan pemberantasan Illegal Fishing dari perusahaan asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia. China mengetahui hal ini, dan memanfaatkan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam urusan maritim dengan memasok senjata militer hingga keperluan militer dalam rangka meningkatkan keamanan maritim di Indonesia.

Hubungan antara China dan Indonesia telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah China juga mengatakan bahwa hubungan China dan Indonesia lancar dan membaik. Kerjasama antara Cina dan Indonesia telah dicapai dalam berbagai bidang. Program Belt and Road Initiative (BRI) merupakan salah satu kebijakan luar negeri pemerintah China untuk memperluas perekonomian ke berbagai belahan dunia. Jaringan transportasi diciptakan untuk menghubungkan Cina dengan negaranegara di berbagai belahan dunia melalui sarana transportasi Barat. Program ini terutama menargetkan negara-negara yang ada di dunia, sehingga kerjasama internasional di berbagai bidang menjadi mudah. China melakukan beberapa kerjasama ekonomi dengan negaranegara di dunia. Tentunya kerjasama ekonomi juga dipengaruhi oleh politik, dimana kerjasama menciptakan hubungan yang erat antar negara.

Dunia tengah dihebohkan dengan kehadiran dari Covid-19. isu ini mulai menyebar ke seluruh negara sehingga menjadi fokus perhatian dari masyarakat dari tiap-tiap negara. Merebaknya informasi mengenai penyebaran dari Corona Virus atau dikenal dengan Covid19 telah menyita perhatian banyak orang di dunia. Kemunculan kebijakan politik ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Tanggapan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait dengan Covid-19 ini mengeluarkan kebijakan yang difungsikan menjaga keamanan bagi masyarakat di Indonesia. Kebijakan politik Presiden Joko Widodo lebih kepada kebijakan yang mengabungkan dua kekuatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah sebagai perantaha dari pemerintah pusat disertai dengan masyarakat yang menjadi subjek.

## BAGAIMANA DINAMIKA KERJASAMA BILATERAL SOSIAL POLITIK ANTARA CHINA DAN INDONESIA SELAMA MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO?

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan China dapat di analisis melalui teori kerja sama. Hal ini didasari oleh kemitraan bilateral kedua negara yang sudah terjalin sejak lama. Kerja sama merupakan serangkaian hubungan yang didasari dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi atau institusi internasional.

Terdapat tiga pendekatan utama mengenai kerja sama internasional. Pendekatan pertama adalah neoliberalisme. Pendekatan ini memandang bahwa kerja sama internasional harus focus pada peran rezim internasional. Dengan bersandar pada rezim internasional, negara bisa memahami common interest. Bagi kaum neoliberalisme, kerja sama internasional (dalam bentuk perusahaan) bagi negara adalah sebuah investasi yang menguntungkan. Melalui kerja sama internasional, negara mampu meraup keuntungan lebih untuk menjamin eksistensi mereka di ranah internasional. Hal ini sangat sesuai dengan keberadaan kaum neoliberalis sebagai pembentuk negara – negara oportunistis yang mengejar *absol Mochtar Kusumaatmadja ute gains*.

- Proyek kereta cepat Indonesia Cina (KCIC)

Pada tahun 2030 diperkirakan perjalanan orang mencapai 929,5 juta orang pertahun meliputi perjalanan antarprovinsi dan internal provinsi. Jumlah perjalanan orang terbesar terjadi di pulau Jawa hingga Bali yaitu sebesar 858,5 juta orang per tahun (92%) dan sisanya tersebar di provinsi lain. Beberapa kebijakan pemerintahan Indonesia dalam merealisasikan kegiatan alih teknologi dan pengembangan industri perkeretaapian nasional, yaitu:

1. Pengembangan roadmap teknologi dan industri perkeretaapian ;
2. Penguasaan teknologi prasarana khususnya teknologi persinyalan, system control, dan alat perawatan ;
3. Penguasaan teknologi kereta api yang berkecepatan tinggi (kereta api cepat) ;
4. Penguasaan teknologi yang berstandar internasional ;
5. Standarisasi produk industri perkeretaapian dalam rangka melindungi industri dalam negeri; dan
6. Dukungan untuk regulasi untuk pemasaran.

Kondisi perkeretaapian Indonesia di atas mendorong Pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Cina. Cina menjanjikan alih teknologi atau transfer teknologi 100% secara terbuka. Jalannya melalui pembangunan pabrik rolling stock yang rencananya dibangun di Purwakarta, Jawa Barat. Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan, dengan alih teknologi secara terbuka, bisa meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pembangunan transportasi modern berbasis kereta. Pembangunan kereta cepat setidaknya akan menyerap 87 ribu orang, yakni pada masa konstruksi selama tiga tahun sebanyak 39 ribu tenaga kerja, pada periode konstruksi Transit Oriented Development (TOD) mencapai 20 ribu tenaga kerja selama 15 tahun dan pada periode operasionalisasi TOD atau pengembangan kawasan baru akan melibatkan 28 ribu tenaga kerja. Besarnya serapan tenaga kerja terjadi karena sekitar 60% pengerjaannya dilakukan di Indonesia. Proyek KCIC dikerjakan oleh dua konsorsium yaitu dari Cina dan Indonesia, dengan biaya 75% pinjaman dari China Development Bank dengan jangka waktu pengembalian 40 tahun. Sementara 15%

biaya akan ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan sisanya konsorsium Cina, sehingga murni biaya proyek tidak berasal dari APBN. Direktur Utama PT. KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan, proyek tersebut juga akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diantaranya akan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Selain itu, kehadiran infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana pengembangan sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

- Kebijakan One Belt One Road (OBOR)

Selain proyek KCIC, kerjasama Indonesia dan Cina juga dimanifestasikan dalam proyek Belt Road Initiative atau lebih dikenal dengan BRI. Realitanya, upaya membuka jalur perda - gangan antarbenua yang dikenal sebagai jalur sutra telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Jalur sutra kuno ini merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Cina den - gan negara-negara di Eropa, Asia, dan Afrika melalui semangat perdamaian, kerjasama, ke - terbukaa n dan inklusivitas, saling belajar dan saling menguntungkan dengan komoditas uta - ma yaitu sutra. Dengan semangat yang sama, Presiden Xi Jinping menghidupkan kembali konsep jalur sutra modern dengan Program BRI dalam kunjungannya ke Khazakhstan pada tahun 2013.

Awalnya, inisiasi BRI dipahami oleh Kementerian Perdagangan Cina semata sebagai solusi ekspor bagi sektor manufaktur baja ke wilayah barat Cina, namun kemudian berhasil menjadi kebijakan luar negeri Cina untuk menciptakan suatu koridor ekonomi dengan memadukan kekuatan geopolitik dan geoekonomi negara-negara middle power di Eropa, Asia, dan Afrika, dengan Cina sebagai pusatnya. Untuk mendukung infrastruktur jal - ur tersebut, Cina menyediakan dana sebesar USD 124 miliar ( $\pm$ Rp1.649 triliun), antara lain untuk pembangunan kereta api cepat pada jalur darat dan pengembangan pelabuhan laut pada jalur laut.

Lima poin utama untuk membangun jalur ini adalah dengan memperkuat:

1. komunikasi kebijakan yang mendukung kerjasama ekonomi;
2. koneksi jalan/infrastruktur dengan koridor transportasi yang besar;
3. fasilitas perdagangan yang menekankan pada penghapusan hambatan perdagangan (trade barriers) dan pengurangan biaya perdagangan dan investasi;
4. kerjasama keuangan yang berfokus pada penyelesaian mata uang untuk mengurangi biaya transaksi dan resiko finansial; serta
5. konektivitas people-to-people.

Maritime Silk Road (MSR) berperan sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan Cina dengan negara-negara Asia hingga Eropa. Titik jalur transregional MSR akan menghubungkan rute darat dan laut

Initiative dan mengembangkan jaringan infrastruktur di kawasan Eurasia. Perencanaan kerjasama strategis ini juga mencakup beberapa negara kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, dan Eropa. Jakarta termasuk sebagai salah satu titik penting dalam

menghubungkan perdagangan Cina di kawasan Asia Tenggara. Inisiasi MSR bersifat inklusif, yang berarti bahwa setiap pihak terlibat dapat membentuk MSR sehingga sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka. Bagi Indonesia, MSR akan berpotensi besar untuk meningkatkan tren perdagangan dan sejalan dengan agenda Indonesia yaitu Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Rute transportasi MSR didukung oleh infrastruktur jalur laut dengan pelabuhan yang memadai di setiap titiknya. Kualitas infrastruktur sangat berdampak pada biaya transportasi, sehingga Cina gencar merealisasikan pembangunan infrastruktur yang memadai. Singkatnya, kualitas infrastruktur yang baik akan memudahkan transportasi barang, menurunkan biaya transportasi, dan pereduksian biaya barang.

Peranan terbesar terhadap total ekspor non-migas Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2018. Negeri Tirai Bambu tersebut menguasai 15,38% pasar ekspor Indonesia dengan nilai perdagangan hingga USD 14,48 miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 34,7% dibanding dengan periode Januari sampai Juli 2017 yang mencapai USD 10,75 miliar. Kemudian, ekspor terbesar produk Indonesia ke Cina pada Januari 2018 antara lain bahan bakar mineral, minyak mineral, lemak dan minyak nabati/hewani, besi/baja, serta pulp dari kayu atau bahan selulosa. Selain itu, Indonesia juga mengekspor karet, biji, abu logam, serta berbagai produk kimia lainnya.

#### **APA KERJA SAMA YANG MASIH BERKEMBANG PESAT HINGGA SAAT INI?**

Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) H.E. Li Qiang di Istana Merdeka, Jumat (8/09). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan dibahas tentang perkembangan kerja sama antara RI-RRT sebagai tindak lanjut pertemuan terakhir Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping pada bulan Juli 2023 lalu di Chengdu. Kerja sama ini mencakup perkembangan kerja sama investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan kemitraan kawasan maupun global.

Di bidang investasi, dibahas rencana Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) untuk pengembangan produksi baterai EV terintegrasi, pembangunan industri petrokimia dengan perusahaan Tongkun dan Xingfengmin, dan pembangunan pabrik kaca Xinyi. Selain itu poin ini juga membahas terkait Two Countries Twin Parks yang dapat menjadi sebuah jembatan investasi manufaktur dan penguatan akses pasar untuk perusahaan Indonesia dan Tiongkok.

Lebih lanjut, dalam pertemuan ini, Menko Airlangga bersama dengan Menteri Perdagangan RRT Wang Wentao melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on E-Commerce Cooperation. Nota Kesepahaman ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman sebelumnya di bidang Ekonomi Digital yang keduanya ditandatangani pada saat KTT G20 di Bali bulan November 2022.

“MoU ini mempromosikan perdagangan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui perdagangan elektronik, layanan logistik perdagangan elektronik, paperless trading, layanan pembayaran lintas batas, penerapan big data dan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta integrasi Internet of Things (IoT),” ujar Menko Airlangga.

Selanjutnya di sektor infrastruktur, dibahas peresmian dan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta kerja sama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kedua negara mendorong adanya implementasi konkret pembentukan kerja sama baru antara Otoritas IKN dan Shenzhen untuk perencanaan pembangunan kota. Selain itu, kedua pemimpin membahas partisipasi aktif dan realisasi investasi sektor swasta dan juga BUMN RRT dalam pengembangan konstruksi di IKN.

Berikutnya, dibahas juga terkait dengan kerja sama perdagangan antara RI-RRT. Kedua pemimpin menargetkan perdagangan bilateral antara RI-RRT tahun ini dapat meningkat di atas USD100 miliar. Untuk itu, Indonesia mendorong perluasan dan kemudahan akses produk Indonesia seperti sarang burung walet, hasil pertanian seperti buah durian dan produk laut.

Pertemuan juga membahas terkait kerja sama kesehatan RI-RRT. Indonesia menyambut dengan baik adanya Forum Investasi Kesehatan dan Biotek di Chengdu yang menghasilkan komitmen kerja sama senilai USD1.5 miliar. Dari kerja sama ini diharapkan Tiongkok dapat memberikan kerja sama pendanaan pembangunan National Gene Bank dan pusat bioteknologi di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan layanan, penguatan ketahanan kesehatan masyarakat dan antisipasi adanya pandemi baru.

Terkait kerja sama kawasan dan global, RI-RRT sepakat untuk memperkuat kerja sama di forum ASEAN dan G20. Salah satu kerja sama potensial yang di bahas terkait partisipasi BUMN dan Swasta Tiongkok dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF). Selain itu dibahas juga Inisiatif Global RRT seperti Global Development Initiative (GDI), Global Security Initiative (GSI), dan juga Global Civilization Initiative (GCI). Presiden Joko Widodo menginginkan adanya penerusan komunikasi bilateral mengenai kerja sama GSI dan GCI untuk dapat selaras dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

## **MENGANALISIS PERKEMBANGAN KERJASAMA BILATERAL ANTARA CHINA DAN INDONESIA.**

Pada tanggal 1 Oktober 2024, Republik Rakyat Tiongkok akan merayakan hari jadinya yang ke-75. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa dalam pembangunan nasional yang telah menarik perhatian dunia. Pada tahun 2023, PDB Tiongkok telah mencapai 47 kali lipat dibandingkan masa awal reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978.

Pada paruh pertama tahun ini, Tiongkok mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, dan perdagangan luar negerinya meningkat sebesar 6,1%, hal ini menunjukkan momentum dan ketahanan kuat dari pembangunan ekonomi Tiongkok, menjadi tenaga penggerak bagi pemulihan ekonomi dunia dan pengembangan kerja sama global.

Pasca berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling awal menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Persahabatan antara Presiden

Soekarno dengan pendiri RRT Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan hubungan bilateral kedua negara.

Dasasila Bandung yang digaungkan bersama oleh negara-negara Asia dan Afrika, yang intinya mengedepankan prinsip hidup berdampingan secara damai dan mencari titik temu dengan tetap menjaga perbedaan, tidak hanya meninggalkan kisah kejayaan dalam sejarah hubungan bilateral, namun juga berdampak besar pada hubungan Internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan kepala negara Indonesia-Tiongkok, hubungan kedua negara berada pada periode terbaik dalam sejarah. Tiongkok dan Indonesia merupakan mitra strategis komprehensif yang penting. Dalam sepuluh tahun terakhir, kepala negara Indonesia-telah bertemu lebih dari sepuluh kali. Pada tahun ini, kedua negara secara resmi meluncurkan Mekanisme Dialog "2+2" antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok, yang secara lebih jauh menyoroti tingginya tingkat hubungan bilateral strategis kedua negara.

Dalam pembangunannya, Tiongkok selalu berpegang pada prinsip saling menguntungkan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi kepentingan dengan negara lain. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah menjadi mitra perdagangan dan investasi yang sangat penting bagi Indonesia.

Selama satu dekade terakhir, investasi Tiongkok di Indonesia terus meningkat dan menjadi sumber investasi asing terbesar kedua bagi Indonesia, dari 50 miliar USD pada tahun 2013 menjadi 139,4 miliar USD pada tahun 2023, atau meningkat hampir tiga kali lipat.

Sebagai proyek repretatif kerja sama Tiongkok-Indonesia, Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, telah memberikan dorongan untuk percepatan perkembangan perekonomian regional.

Sejak diresmikannya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober tahun lalu, volume penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus mengalami pertumbuhan, dan telah memberikan kemudahan perjalanan bagi masyarakat. Kedua pihak telah melakukan kerja sama menyeluruh dalam pengoperasian kereta cepat, misalnya pelatihan bakat, transfer teknologi dan aspek lainnya. Pihak Tiongkok telah berhasil menyelesaikan pelatihan teknis untuk lebih dari 160 karyawan yang meliputi pengemudi EMU kereta cepat dan lain-lain.

Dalam 75 tahun terakhir, Tiongkok telah bangkit dari negara miskin yang dilanda perang menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Standar hidup masyarakat Tiongkok juga telah mencapai prestasi bersejarah, keluar dari jurang kemiskinan, lalu mencapai kehidupan subsisten, mewujudkan masyarakat yang cukup sejahtera, dan akan segera menjadi masyarakat sejahtera secara menyeluruh.

Pada bulan April tahun ini, saat Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk memperkuat kerja sama di bidang pengentasan kemiskinan dan bersama-sama mendorong kemakmuran dan kemajuan masyarakat kedua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama di bidang budaya antara Tiongkok-Indonesia telah membuahkan hasil, dan Tiongkok telah menjadi salah satu negara sumber wisatawan utama bagi Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan

Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai 126.100 orang pada Juli 2024, yang merupakan rekor tertinggi sejak Februari 2020.

Dihadapkan pada lingkungan internasional yang kompleks, Tiongkok sepenuhnya menyadari bahwa pembangunannya sendiri tidak terpisahkan dari lingkungan internasional yang damai dan stabil. Selama 75 tahun sejak RRT berdiri, Tiongkok telah membuktikan kegigihan dalam menjaga perdamaian dunia dan mendorong pembangunan bersama.

Inisiatif pembangunan global, inisiatif keamanan global, dan inisiatif peradaban global yang diusulkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping menunjukkan arah ke masa depan bagi umat manusia dari tiga dimensi yaitu pembangunan, keamanan, dan peradaban, sekaligus memberikan panduan strategis untuk membangun komunitas umat manusia dengan masa depan bersama.

## **MEMBANDINGKAN MODEL KERJA SAMA BILATERAL CHINA – INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN DI KAWASAN.**

### **Model Kerja Sama Bilateral China – Indonesia**

Kerja sama bilateral antara China dan Indonesia telah berkembang pesat dalam berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi, infrastruktur, dan digital. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai model kerja sama ini serta perbandingannya dengan negara-negara lain di kawasan.

- **Kerja Sama Ekonomi dan Infrastruktur**

1. **Pembangunan Infrastruktur:**

Indonesia dan China telah menjalin kerja sama yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan<sup>24</sup>.

Sejak 2015, terdapat 36 nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi<sup>56</sup>.

2. **Investasi:**

China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan mencapai USD 112,5 miliar pada tahun 2023. Investasi China di sektor teknologi dan energi terbarukan juga menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia<sup>67</sup>.

- **Kerja Sama Digital**

1. **Transformasi Digital:**

Pada tahun 2022, Indonesia dan China menandatangani MoU untuk kerja sama di bidang ekonomi digital, yang mencakup pengembangan infrastruktur digital, e-commerce, dan inovasi teknologi<sup>13</sup>.

Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di seluruh sektor, termasuk telemedicine dan pendidikan daring<sup>1</sup>.

- Perbandingan dengan Negara Lain di Kawasan

1. ASEAN:

Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan China dalam hal investasi dan perdagangan. Negara-negara lain seperti Malaysia dan Vietnam juga menjalin kerja sama dengan China tetapi seringkali lebih fokus pada sektor tertentu seperti manufaktur atau pertanian<sup>68</sup>.

2. Australia:

Australia memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dalam kerjasama dengan China, sering kali mengedepankan isu-isu keamanan dan kedaulatan. Sementara itu, Indonesia cenderung lebih pragmatis dalam menjalin hubungan ekonomi meskipun tetap mempertahankan kedaulatan di wilayah Natuna<sup>56</sup>.

3. Jepang:

Jepang berfokus pada kerjasama yang lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan teknologi tinggi. Meskipun Jepang juga merupakan investor besar di Indonesia, pendekatannya berbeda dengan China yang lebih agresif dalam hal investasi infrastruktur<sup>45</sup>.

## KESIMPULAN

Kerja sama bilateral antara China dan Indonesia menunjukkan model yang sangat pragmatis dan saling menguntungkan, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan transformasi digital. Dengan adanya potensi besar dari kedua negara, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi dan energi terbarukan, hubungan ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan untuk menjalin kemitraan yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Universitas Ma Chung. (n.d.). Fakta Menarik Hubungan Indonesia-Tiongkok. Diakses dari <https://machung.ac.id/artikel/fakta-menarik-hubungan-indonesia-tiongkok/>
- Amalia, R. (2018). Kerja Sama Maritim Indonesia-China Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3). Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/view/9283>
- Rahman, A. (2020). Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3). Diakses dari <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/47/10>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Sepakati Kerja Sama di Bidang Ekonomi Digital. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5374/indonesia-dan-republik-rakyat-tiongkok-sepakati-kerja-sama-di-bidang-ekonomi-digital>
- Chen, R. (2023). Perkembangan Hubungan Indonesia-Tiongkok Sejak 75 Tahun Berdirinya RRT. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/rudychen7755/66f51819ed641576ae7c7802/perkembangan-hubungan-indonesia-tiongkok-sejak-75-tahun-berdirinya-rrt>